

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN ANAK
DI LINGKUNGAN SEKOLAH**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

DASTINA

NIM : 10500113285

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DASTINA
NIM : 10500113285
Tempat/Tgl. Lahir : PARE-PARE, 24 Juli 1995
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Alamat : Asrama Piba UIN Alauddin
Judul : Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Anak di
Lingkungan Sekolah.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gowa, 11 September 2017

Penyusun,

Dastina

NIM : 10500113285

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah"** yang disusun oleh saudara **Dastina**, NIM: **10500113285**, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan hari Rabu, 30 Juli 2017 bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1438 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.



Samata, 30 Agustus 2017
9 Zulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (.....)
Sekretaris : Dr.Hamsir, M.Hum (.....)
Munaqisy I : Azhar Sinilele, S.H., M.H (.....)
Munaqisy II : Erlina, S.H., M.H (.....)
Pembimbing I : Dr. Andi Safriani, M.H (.....)
Pembimbing II : Muhammad Anis, S.Ag., M.H (.....)

Diketahui oleh,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

 Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag 

NIP. 19621016 1999003 1 003

KATA PENGANTAR



Puji hanyalah milik Allah swt. Sang penguasa alam semesta yang dengan rahmat dan rahimnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi yang terakhir Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam hingga dapat kita nikmati sampai saat ini indahnya Islam dan manisnya iman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Skripsi ini juga dipersembahkan kepada orang-orang yang peneliti cintai dan mencintai peneliti atas kerja keras yang telah diberikan dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab kepada peneliti selama ini. Serta saudara-saudari peneliti yang telah banyak berkorban baik tenaga maupun waktu, ilmu dan mengajarkan arti keluarga kepada peneliti. Semoga Allah swt. Mengampuni dosa-dosa kita, meringankan azab kubur kita, menjauhkan kita dari siksa nerakanya, dan menjadikan kita sebagai golongan hamba-hamba yang di ridhoinya. *Amin Allahumma Aminn.*

Sebagai suatu hasil penelitian, tentulah melibatkan partisipasi banyak pihak yang telah berjasa. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih

dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, secara khusus peneliti haturkan kepada:

1. Ayahanda M.Bachtiar dan ibunda Zaenab serta saudara-saudari peneliti Ida Wahyuni, Dick Wahyudin, Zulkarnaim, Sri Mulyana, Nurmadinah, Achmad Nabil serta Nenek peneliti Djawi, yang telah berjuang mengasuh, membimbing dan membiayai peneliti selama dalam pendidikan, sampai selesainya skripsi ini, kepada beliau peneliti senantiasa memanjatkan doa kepada Allah swt. Mengasihi dan memberikan kebahagiaan.
2. Bapak *Prof. Dr. H. Musafir Pababbari*, M.Si. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak *Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin M.Ag* selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Istiqamah, S.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Rahman Syamsuddin S.H, M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
5. Ibu Dr. Andi Safriani, S.H., M.H. Sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Anis, S.Ag.,M.H. yang telah memberikan arahan, meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran kepada peneliti hingga bisa menyusun skripsi ini.
6. Segenap jajaran Bapak Ibu Dosen, Pimpinan, Karyawan dan Staf di lingkungan Fakultas Syari'ah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Asriandi yang telah memberikan motivasi, dukungan dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

8. Teman-teman Asrama Piba, Alif alfiawati, Ni'mah Nuraini Ibrahim, Nur Afni Oktafia, Sartika, Hikmah Khaerani Ibrahim, Lisa Indrawati, Ainun Jariah, Kak Anci Bte Safifuddin, Lisa Rianti, Kak Eko Surya Alamsyah, Wasinta dan Anni Safitri.
9. Teman seperjuangan peneliti Indahsari, Moderyati, Wildani, Hariani, Hariani Talib, Suryana Ulfa, Ufiq, dan Nurfauziah Annis Auliana.
10. Teman-teman Angkatan 2013 khususnya Adam Malik, Andi Musyrifa Achdar, Vita, Zulfaizah Nurdin, dan Taslim Annafrawi.
11. Teman-teman KMP UIN 2013 Aswandi Razak, Muh.Surya Anugrah, Nisma dan Yuniarti.
12. Kawan-kawan KKN Reguler angkatan 53 Desa Tangke Bajeng, Kec. Bajeng, Kab. Gowa, khususnya teman posko peneliti Firiani, Fitri Syam, Hani Irwani, Syamsul dan Ikram yang telah mewarnai hari-hari di lokasi KKN Reguler dan telah banyak memberikan pengalaman hidup.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa sebagai hamba Allah yang tidak luput dari kesalahan tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan, kesalahan, serta jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan kecil ini bermanfaat bagi diri peneliti pada khususnya, dan bagi siapa saja yang ingin membacanya.

Gowa, 17 Agustus 2017

Penyusun

Dastina

Nim. 10500113285



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1- 14
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15-33
A. Tinjauan Umum Mengenai Anak.....	15
B. Tinjauan Umum Kekerasan.....	17
C. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan terhadap Anak	21
D. Kekerasan di Lingkungan Sekolah.....	24
E. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak	27
F. Perlindungan Anak di lingkungan sekolah	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	34-36
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Sumber Data	35
C. Metode Pengumpulan Data	35
D. Instrumen Penelitian.....	36
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36

BAB	IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37-67
	A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
	B.	Peranan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah	39
	C.	Faktor-faktor yang menghambat implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah	56
BAB	V	PENUTUP	68-70
	A.	Kesimpulan	67
	B.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA			71
LAMPIRAN			

ABSTRAK

Nama : Dastina
Nim : 10500113285
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peranan undang-undang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah ? 2) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah?

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Peranan undang-undang Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah Sesuai pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah diterapkan namun kekerasan di Sekolah masih terjadi baik psikis maupun fisik baik antar siswa maupun dari tenaga kependidikan. Kekerasan yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah adalah kekerasan psikis antar siswa. Adapun Faktor-faktor yang mendukung implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah yaitu dengan menerapkan sekolah tanpa kekerasan, pelajaran pendidikan agama yang mengajarkan berperilaku lemah lembut, pencegahan dengan melakukan penanaman karakter baik siswa maupun tenaga kependidikan. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah yaitu 1) Kurangnya pengetahuan dari guru atau tenaga kependidikan bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis tidak selalu efektif baik karena adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga guru atau tenaga kependidikan menjadi lebih sensitif dan reaktif, adanya tekanan kerja atau karena pola authoritarian yang masih umum digunakan dalam pola pengajaran di Indonesia 2) Siswa yang memiliki sifat yang cenderung lemah biasanya membuat siswa yang lebih kuat untuk melakukan kekerasan terhadap siswa yang lemah agar dirinya merasa hebat. Kedua sikap ini dapat dipengaruhi oleh pola asuh keluarga maupun dari lingkungan anak.

Implikasi dari penelitian ini adalah 1) Sebaiknya sekolah menerapkan pendidikan tanpa kekerasan, dengan tidak hanya menekankan kemampuan kognitif namun juga memerhatikan kemampuan afektif dan kemampuan psikomotorik anak agar anak tidak hanya berpengetahuan namun juga sekolah memerhatikan keterampilan anak. Dan anak tidak hanya pintar namun juga memiliki sikap yang baik 2) Sebaiknya Orang Tua memberikan perhatian lebih pada anak dan kasih sayang agar anak menjadi penyayang dan tidak melakukan kekerasan 3) Untuk siswa yang mengalami kekerasan Segera *sharing* pada orangtua atau guru atau orang yang dapat dipercaya mengenai kekerasan yang dialaminya agar segera mendapatkan pertolongan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikisnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam memajukan sebuah bangsa. Maju mundurnya sebuah Negara sangat di pengaruhi oleh pendidikan yang ada di negara itu. Sebab pendidikan yang baik akan mencetak anak bangsa yang berkualitas. Pendidikan dan anak adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap individu memulai pendidikannya di usia anak-anak. Pendidikan dewasa ini tidak lagi dianggap sebagai pelengkap kebutuhan manusia saja, namun telah diposisikan sebagai instrumen pokok dengan tingkat urgensi yang hampir sama dengan tiga kebutuhan pokok manusia, yaitu; pangan, sandang dan papan.

Pendidikan akan mempengaruhi kualitas hidup. Kesadaran manusia terhadap pentingnya pemenuhan pendidikan yang berkualitas dalam hidupnya berkembang seiring dengan peranan-peranan strategis pendidikan dalam kehidupan manusia dan negara/bangsa.

Mengingat pentingnya peranan pendidikan bagi kemajuan suatu negara, masyarakat dan individu, maka tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas pada hakekatnya tidak hanya menjadi urusan negara saja, tetapi juga tanggung jawab semua pihak sebagai komponen dari pembangunan. Masyarakat dalam hal ini diharapkan dapat berperan serta dalam mengelola pendidikan

itu sendiri. Negara sebagai organisasi politik terbesar yang dibentuk oleh rakyat memang mempunyai tanggung jawab terbesar dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya, hal ini disebabkan.¹

1. Demi menumbuhkan demokrasi politik;
2. Kebutuhan akan warga negara yang terdidik merupakan kebutuhan esensial yang nantinya diperlukan untuk memajukan bangsa dan negara di era modern.

Di Indonesia, tanggung jawab negara akan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negaranya secara eksplisit diatur dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, alinea keempat dan batang tubuh Pasal 31. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 menyatakan tujuan nasional Negara Indonesia salah satunya adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Nampak dari pernyataan tersebut bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa dicapai melalui Pendidikan. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” dan, dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa : “ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam satu sistem pengajaran nasional”.

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa dunia pendidikan merupakan dunia yang sarat akan nilai-nilai kebaikan (etika) dan nilai-nilai keindahan

¹Bacharudin Musthafa, *Education Reform (The Case of Indonesia)*, (The Republic of Indonesia and The World Bank: Jakarta, 2001) h.12.

(estetika),bahkan secara ekstrem disebut sebagai dunia tanpa cela, karena dunia pendidikan merupakan dunia untuk mewujudkan manusia lebih tangguh, bermartabat dan bermoral, sehingga manusia akan dapat *survive* dalam mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya.

Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk pelajaran siswa/murid, tempat bagi anak untuk menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Khususnya di Sekolah Dasar anak akan berada di lingkungan sekolah selama 6 jam .

Pada pasal 54 undang-undang no.35 tahun 2014 :

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik,tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan,aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat²

Jelas, bahwa anak dalam lingkungan sekolah dilindungi oleh Undang-undang.Namun, kenyataan yang terjadi masih banyak kekerasan pada anak di lingkungan sekolah.

Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman,yaitu dengan UU No. 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan setiap anak

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Langkah pemerintah selanjutnya adalah dengan menetapkan UU Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) yang diharapkan anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan haknya. Terakhir, pemerintah menetapkan UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menggariskan bahwa anak adalah penerus bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Namun meskipun Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah disahkan, tetapi pelaksanaan lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Sedangkan, UU perlindungan anak ini diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan terhadap anak sering kali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal, kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (stuktural) juga membawa dampak buruk permanen terhadap anak. Karenanya, istilah *child abuse* atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai dari yang bersifat fisik (*physical*) hingga seksual (*sexual abuse*) ; dari yang bermatra psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan stuktural.

Sebagaimana dalam Q.S Ali-Imran / 3: 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahannya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal.

Dalam Surah ini Allah menyuruh manusia untuk berbuat lemah lembut. Dalam perkataan maupun perbuatan. Namun, tetap saja kekerasan pada anak sering terjadi bahkan Kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru sering dibenarkan oleh beberapa pihak dengan alasan mereka juga pernah menjadi korban kekerasan saat masih duduk di bangku sekolah namun tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Sebagian mempercayai bahwa hal tersebut dapat membuat mereka berhasil dan tidak bermental lemah di masa tua. Jelas *argumentum ad antiquitatem* semacam ini tidak berdasar. Budaya kekerasan tidak akan menghasilkan apa-apa.

Riset menunjukkan bahwa lingkungan sekolah sangat mempengaruhi perilaku remaja. Siswa juga merasa lebih tidak aman berada di sekolah dengan tingkat kekerasan yang tinggi. Sedangkan jika di sekolah saja siswa sudah merasakan tidak nyaman bagaimana mereka akan mendapatkan pendidikan yang layak sedangkan Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki komitmen besar bagi perlindungan

anak dalam pendidikan. Komitmen tersebut bukan hanya termaktub dalam undang-undang semata, namun secara eksplisit tercantum dalam UUD 1945.

Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Di pihak lain, konstitusi juga memberikan atensi besar terhadap perlindungan anak dari kekerasan. Pasal 28 B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Indopos 17 april 2017 Kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Sulsel terbilang cukup tinggi. Data 2016, terjadi 1.698 kasus. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut dari data 2016, kasus kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak paling tinggi, ada 1.015 kasus. Kemudian disusul kekerasan seksual mencapai 306 kasus.

Sedangkan, data kekerasan terhadap anak yang dikeluarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga harusnya menjadi perhatian. KPAI menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 terjadi 2.178 kasus, 2012 terjadi 3.512 kasus, 2013 ada 4.311 kasus, dan 2014 ada 5.066 kasus. Dan ternyata bidang pendidikan memberikan sumbangsih yang cukup besar dengan berada di urutan kedua dari lima kasus dengan angka kekerasan tertinggi per tahun 2011 – April 2015. Sebanyak 1.764 kasus terjadi di bidang pendidikan dan 87,6 persen anak pernah menjadi korban kekerasan di lingkungan sekolah. Angka-angka menakjubkan ini tentu bisa lebih besar di lapangan mengingat tidak semua kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan.

Salah satu kasus kekerasan yang dialami siswa sekolah dasar baru-baru ini yaitu oknum polisi penganiaya bocah kelas 6 SD Negeri Kotawaringin Barat, Kalteng. Sabtu 15 juli 2017 , tak terima anaknya didorong oleh teman sekolah oknum anggota Sabhara Polres Kotawaringin Barat, Kalteng brigadir Polisi ASS tega aniaya anak kelas 6 SD, berinisial MA. Akibat penganiayaan tersebut, MA mengalami trauma dan gigi goyang serta mata bengkak.

Bertolak dari data di atas bahwa berbagai bentuk kekerasan dalam lingkungan sekolah merupakan ancaman bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sedangkan eksistensi undang-undang perlindungan anak yang mengatur masalah kekerasan di sekolah masih relatif fragmentaris, maka penulisan karya tulis ini diharapkan dapat mengkaji implementasi pasal 54 tentang undang-undang no.35 tahun 2014 tentang perlinungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah.

Mendasarkan pada latar belakang masalah seperti dijelaskan di atas serta berbagai fenomena kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan khususnya di lingkungan sekolah saat ini, masalah kekerasan di lingkungan sekolah yang kerap terjadi terhadap anak didik perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu penulis memilih judul : Implementasi Undang-undang No.35 tentang Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan undang-undang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah ?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi pasal 54 UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah di Sekolah Dasar Sekecamatan Mattirosompe.

2. Deskripsi Fokus

Judul penelitian ini adalah Implementasi Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini maka penulis memberikan pengertian terhadap kata-kata yang dianggap penting dalam judul tersebut sebagai berikut :

a. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini biasanya selesai setelah dianggap permanen. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan

Menurut Mazmanian dan Sabatier, Implementasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk perintah atau keputusan, atau putusan pengadilan. Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan, dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan.

b. Pasal 54 UU No.35 Tahun 2014

Secara spesifik disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak, kewajiban pendidik, tenaga kependidikan, aparat atau masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak di dalam dan di lingkup satuan pendidikan dari tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain. Bagi mereka yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, mengakibatkan luka berat atau kematian juga tidak luput dari ancaman pidana penjara dan/atau denda.

c. Anak

Anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam Convention on The Right Of the Child tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.

UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun (Huraerah, 2006: 19).

Maka, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Menurut Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara.

d. Kekerasan terhadap anak

Kekerasan terhadap anak menurut pasal 13 UU Perlindungan Anak adalah perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya. Dalam penjelasan pasal 13 ini diuraikan bahwa perlakuan diskriminasi, misalnya

perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan *eksploitasi*, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

e. Kekerasan anak di sekolah

Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan kepala sekolah, guru, pembina sekolah dan karyawan antara lain memukul dengan tangan kosong atau dengan benda tumpul seperti penggaris, melempar dengan penghapus, mencubit, menampar, mencekik, menyundut rokok, memarahi dengan ancaman kekerasan, menghukum berdiri dengan satu kaki di depan kelas, berlari mengelilingi lapangan, menjemur murid di lapangan sambil menghormat bendera merah putih, pelecehan seksual, serangan seksual, pembujukan untuk persetubuhan hingga perkosaan dan lain-lain.

Kekerasan yang dilakukan sesama siswa, Kekerasan terhadap siswa yang lebih lemah ini dapat berbentuk antara lain, pertama, secara fisik, memukul, menendang, mengambil milik orang lain. Kedua, secara verbal mengolok-olok nama siswa lain, menghina, mengucapkan kata-kata yang menyinggung. Ketiga, secara tidak langsung menyebarkan cerita bohong, mengucilkan, menjadikan siswa tertentu sebagai target humor yang menyakitkan, mengirim pesan pendek atau surat yang keji. Mengolok-olok nama merupakan hal yang paling umum karena ciri-ciri fisik siswa, suku, etnis, warna kulit, dan lain-lain

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk:
 - a. Mengetahui peranan undang-undang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah.
 - b. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah.
2. Melalui penelitian yang akan dilakukan, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :
 - a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi UU.No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah.

Selain itu peneliti ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu hukum agar dapat berkolaborasi dalam pengimplementasian UU No.35 Tahun 2014.

b. Manfaat Praktiks

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana pengimplementasian UU No.35 Tahun 2014 memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan di sekolah.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan dengan judul skripsi yang menjadi penelitian penulis, ada beberapa yang telah diteliti oleh peneliti lain diantaranya :

1. Muhammad Wahyudi Arifin (2009), NIM : 04370029, Jurusan Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum atas Anak Korban Kekerasan (Analisis pasal 80 No.23 tahun 2002)” tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pandangan hukum islam dan Undang-undang perlindungan anak tentang kekerasan anak dan untuk menjadikan Negara, Penegak hukum dan masyarakat luas, yang meliputi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam mencari solusi dan jalan keluar agar dapat mencegah, menekan atau sama sekali menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *liblary research*, penelitian mengkaji menelaah buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan atas korban kekerasan anak.
2. Ayu Nadia Maryandani (2016), NIM : 1212011059 , Fakultas Hukum, bagian Hukum Pidana, Universitas Lampung Bandar lampung dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban

Penelantaran oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Sedangkan penelitian ini berjudul “Implementasi Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah ” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan undang-undang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengelolaan data baik data primer maupun sekunder dianalisa secara kuantitatif.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Anak menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.¹
- b. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.²
- c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik anak yang masih berada dalam kandungan.³
- d. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian anak pada batasan belum cukup umur

¹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

tampak dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun. Pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan anak adalah yang orang belum dewasa atau belum berumur enam belas tahun. Oleh karena itu, apabila seseorang tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya tersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya pemeliharannya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.⁴

- e. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.⁵

Bertitik tolak dari aspek pengertian anak di atas, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur unifikasi hukum pasti dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur terhadap seorang anak. Oleh sebab itu, mengenai batas anak yang masih digolongkan sebagai anak terdapat perbedaan penentuan. Dalam hal ini, Irma Setyowati Soemitro⁶ mengambil garis batas bahwa terhadap

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁶ Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta : Bumi Aksara, 1990) h. 18

perbedaan batasan umur yang ada di dalam hukum positif Indonesia terdapat perbedaan, maka diambil garis batas pengertian anak berlaku untuk anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun.

B. Tinjauan Umum Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan berarti penganiyaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihai keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.⁷ Pada penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa : ⁸Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut Pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut :⁹

Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu :

- a. Pengerusakan terhadap barang;

⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : P.N Balai Pustaka, 1990) h.425.

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal* (Bogor : Politea, 1991) h.84.

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politea, 1991) h.126.

- b. Penganiyaan terhadap hewan atau orang;
- c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- d. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa objek kekerasan bukan hanya pada orang, tetapi juga pada benda atau hewan. Kata kekerasan setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.¹⁰

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Menurut Santoso¹¹ kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (*Assault and Battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh

¹⁰ Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, (Bandung, Politea, 1987) h.125.

¹¹ Topo Santoso, *Kriminologi* (Jakarta : Grafindo Persada, 2002) h. 24.

berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.

2. *Bentuk-bentuk Kekerasan*

Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya tidak di satukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut :¹²

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP;
- b. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359 -367 KUHP

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga golongan, yaitu :¹³

- a. Kekerasan Fisik

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politea, 1991) h. 84-85.

¹³ Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, (Yogyakarta : Kanisius, 1992) h. 62.

jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh : kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya.

Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksualitas segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak abik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini.

C. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan terhadap Anak

Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata Abuse yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.¹⁴ Kata ini didefinisikan sebagai “*improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.

Marzuki Umar Sa’abah mengemukakan (*child abuse*) adalah tindakan terhadap anak dengan cara yang disadari ataupun tidak yang berakibat mengganggu

¹⁴Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia* (Bandung : Nuansa (Anggota IKAPI), 2006),h.36.

proses tumbuh kembang anak. Sehingga dapat menimbulkan cacat fisik, mental bahkan kematian pada anak.¹⁵

1. Bentuk- bentuk Kekerasan terhadap Anak

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak menurut Mieke Diah Anjar Yanti adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda keras, dijemur di bawah terik sinar matahari.
- b. Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya seperti perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi.
- c. Kekerasan psikis adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan psikologis anak seperti kata-kata yang

¹⁵ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta : UII Pres , 2006),h. 91.

¹⁶Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, (Propinsi Jateng : Bapenas 2006), h. 9-11.

mengancam, menakut-nakuti, berkata-kata kasar, mengolok-olok, perlakuan diskriminatif, membatasi kegiatan sosial dan kreasi.

- d. Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penggunaan anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja secara berlebihan, menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.
- e. Tindak pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua, orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian dan penelantaran pada penyediaan perumahan, pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.

Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak menurut Mufidah ada tujuh bentuk kekerasan yang lazim ditemukan, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Kekerasan dalam bentuk fisik seperti pemukulan, penganiayaan berat yang menyebabkan jatuh sakit, bahkan kematian.
- b. Kekerasan psikis seperti ancaman, pelecehan, sikap kurang menyenangkan yang menyebabkan rasa takut, rendah diri, trauma, depresi atau gila.
- c. Kekerasan ekonomi, misalnya menelantarkan anak.

¹⁷Mufidah. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan* (Papringan, Pilar Media (Anggota IKAPI), 2006), h. 18-19.

- d. Kekerasan seksual berbentuk pelecehan seksual, pencabulan dan pemerkosaan.
- e. Eksploitasi kerja dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
- f. Eksploitasi seksual komersial anak
- g. *Trafiking* (perdagangan) anak

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai kekerasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu garis besar bahwa tindakan kekerasan yang terjadi pada anak sudah diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Kekerasan di Lingkungan Sekolah

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun pelaksanaannya masih menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia masih jauh dari kondisi yang disebutkan dalam Pasal tersebut. Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan fisik, psikis, maupun pelecehan seksual. Ironisnya perilaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti keluarga. Kondisi ini amatlah memprihatinkan, namun bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Perlu koordinasi yang tepat di lingkungan sekitar anak terutama pada lingkungan keluarga untuk mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan, menyeleksi tayangan televisi maupun

memberikan perlindungan serta kasih sayang agar anak tersebut tidak menjadi anak yang suka melakukan kekerasan nantinya.

Beberapa definisi tentang kekerasan di sekolah, yakni :¹⁸

1. Kekerasan Fisik : Merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada siswa, seperti menampar/memukul, menganiaya dan lain sebagainya.
2. Kekerasan Psikis : Kekerasan secara emosional yang dilakukan dengan cara menghina, melecehkan, mencela atau melontarkan perkataan yang menyakiti perasaan, melukai harga diri, membuat orang merasa hina, lemah, tidak berguna, dan tidak berdaya.
3. Kekerasan *Defensive* : Kekerasan yang dilakukan dalam rangka tindakan perlindungan, bukan tindakan penyerangan
4. Kekerasan Agresif : Kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti merampas dan lain sebagainya. Kekerasan dalam hukuman fisik adalah aplikasi rasa sakit fisik yang disengaja sebagai metode pengubah perilaku, dengan memukul/menampar, mencubit, mengguncang, menyorong, memakai benda atau aliran listrik, mengurung di ruang sempit, gerakan fisik yang berlebihan, drill, melarang membuang air kencing, dan lain-lain. Hukuman fisik di sekolah bukan kebutuhan operasional dari pendidik guna

¹⁸Nurul fikri “kekerasan pada anak didik di lingkungan sekolah” *ragam media kolom-kolom siswa* <http://nurulfikri.sch.id/index.php/ragam-media/kolom/kolom-siswa/143> kekerasan-pada-anak-didik-di-sekolah. (5 Maret 2013).

mengendalikan murid yang berbahaya atau melindungi komunitas sekolah dari ancaman bahaya.

Dalam hal ini juga digolongkan jenis-jenis kekerasan yang diterima anak, yaitu :¹⁹

1. Kekerasan Fisik : bentuk kekerasan seperti ini mudah diketahui karena akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban kasus *physical abuse*: presentase tertinggi usia 0-5 tahun (32.3%) dan terendah usia 13-15 tahun (16.2%). Kekerasan ini biasanya meliputi memukul, mencekik, menempelkan benda panas ke tubuh korban dan lain-lainnya. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga sering kali mengakibatkan korban meninggal.
2. Kekerasan Psikis : bentuk kekerasan seperti ini sering tidak nampak, kekerasan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, teror, celaan/makian dengan kata-kata kasar, maupun sering membanding- bandingkan hal-hal dalam diri anak tersebut dengan anak-anak lainnya. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak seperti ini anak mudah merasa cemas atau gelisah, menjadi pendiam, rendah diri, dan mental anak menjadi lemah.

¹⁹ Donald E. Greydanus, *Korporal Punishment in School, Journal of Alescence Health*, (New York : Elasvier inc, 2003) h.385-393.

3. Kekerasan Seksual : bentuk kekerasan seperti pelecehan, pencabulan maupun pemerkosaan. Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga seringkali menimbulkan luka secara fisik.

E. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Menurut Suharto dalam bukunya Abu Hurairah, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, di antaranya adalah sebagai berikut:²⁰

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya.
2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
3. Keluarga tunggal anak keluarga pecah (*broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir di luar nikah.

²⁰ Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia* (Bandung : Nuansa (Anggota IKAPI), 2006), h. 39

5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
6. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
7. Kondisi lingkungan yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya empat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak ada mekanisme kontrol sosial yang stabil.

Sementara Rusmil dalam bukunya Abu Hurairah menjelaskan bahwa penyebab atau resiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi ke dalam tiga faktor, yaitu:²¹

1. Faktor orang tua dan keluarga

Faktor orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan pada anak diantaranya :

- a. Praktik-praktik budaya yang merugikan anak :

-Kepatuhan anak kepada orang tua

- b. Dibesarkan dengan penganiayaan

- c. Gangguan mental

²¹ Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia* (Bandung : Nuansa (Anggota IKAPI), 2006), h. 4.

- d. Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, terutama merupakan yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun.
- e. Pecandu minuman keras dan obat

2. Faktor lingkungan sosial Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan dan penelantaran pada anak diantaranya:

- a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis
- b. Kondisi sosial ekonomi yang rendah
- c. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri
- d. Status wanita yang dipandang rendah
- e. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis

3. Faktor anak sendiri

- a. Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya
- b. Perilaku menyimpang pada anak
- c. Dampak kekerasan terhadap anak

F. Perlindungan Anak di lingkungan sekolah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata Lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan

kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang bersifat revresif, baik lisan maupun yang tertulis.

Perlindungan Hukum menurut para ahli :

1. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindunganharkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukumyang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasaaman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancamandari pihak manapun.
4. Menurut Muktie, A. Fadjar. Perlindungan Hukum adalah penyempitan artidari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.²²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut :

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan , anak korban

²² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011) h. 12.

kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi. Hak Anak, yaitu :

1. Prinsip-Prinsip Non-diskriminasi (*non-discrimination*)
2. Prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*);
3. Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan dan pengembangan (*the right to life, survival and development*);
4. Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of child*).

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pada Pasal 54 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan

lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattirosompe Kelurahan Langnga, di Sekolah Dasar sekelurahan langnga. Penulis melakukan penelitian di Kelurahan Langnga dengan dasar pertimbangan bahwa di Kelurahan Langnga terdapat empat sekolah dasar yang berdekatan yang memudahkan penulis memperoleh data yang banyak dan membandingkan antar ke empat sekolah mengenai penerapan undang-undang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah.

Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka spesifikasi pada penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* . Penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis empiris* berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai “Implementasi

Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Anak di Lingkungan Sekolah”.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini;
2. Sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh dari undang-undang, literatur, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan materi penulisan dan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi, dilakukan Penulis dengan cara mengamati secara langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Melalui observasi Penulis dapat memperoleh pandangan-pandangan mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, melihat langsung keterkaitan antara pelaku dan korban. Menafsirkan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh korban, serta memahami pengaruh dari sebuah tindak pidana terhadap korbannya.
2. Kuesioner, diberikan kepada anak di lingkungan atau siswa di SDN sekelurahan Langnga sekolah sebagai salah satu sumber informasi bagi Penulis dalam menjawab rumusan masalah yang ada dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang erat kaitannya dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

3. Wawancara, diberikan kepada kepala sekolah di SDN se-kelurahan Langnga sebagai salah satu sumber informasi bagi Penulis dalam menjawab rumusan masalah yang ada dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang erat kaitannya dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah smartphone. Instrumen penelitian ini merujuk pada metodologi penelitian.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kuantitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kuantitatif yakni merupakan data yang berbentuk angka.¹Berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas.

¹RiantoAdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), h. 56.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di kelurahan langnga kecamatan Mattirosompe kabupaten Pinrang. Langnga adalah sebuah kelurahan dan merupakan ibukota dari kecamatan Mattirosompe, kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Langnga terbagi atas dua dusun/lingkungan, yaitu Lingkungan Langnga dan Lingkungan Birittasi. Kelurahan langnga terletak pada 3,8436 LS dan 119,5211 BT dan berjarak sekitar 190 km dari kota makassar.

Batas-batas Kelurahan Langnga :

Sebelah Utara : Desa Mattombong

Sebelah Timur : Kecamatan Lanrisang

Sebelah Selatan : Selat Makassar

Sebelah Barat : Kelurahan Pallameang

Jumlah penduduk adalah 5040 orang, yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2382 (47,26%) dan jumlah penduduk perempuan 2658 orang (52,74%).

Sarana pendidikan di kelurahan Langnga adalah 3 TK, 4 SD dan 1 SMP. Ketiga TK tersebut berstatus swasta dan dikelola oleh masyarakat setempat. Terdapat 4 SD, yaitu SDN 52, SDN 192, SDN 53 dan SDN 232 Langnga. Dan terdapat 1 SMP yaitu SMPN 1 Mattirosompe.

1. SDN 192 Langnga

SDN 192 Langnga adalah salah satu Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Langnga yang terletak di Jl. Mawar No.14 Langnga, Kec.Mattirosompe, Kab.Pinrang. Dengan jumlah siswa yang terdaftar sebanyak Siswa Laki-laki : 61 dan Siswa Perempuan : 64. Adapun tenaga pendidik / pengajar sebanyak 9 orang.

2. SDN 232 Langnga

SDN 232 Langnga adalah salah satu Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Langnga yang terletak di Langnga, Kec.Mattirosompe, Kab.Pinrang. Dengan jumlah siswa yang terdaftar sebanyak Siswa Laki-laki : 82 dan Siswa Perempuan : 71. Adapun tenaga pendidik / pengajar sebanyak 12 orang.

3. SDN 52 Langnga

SDN 52 Langnga adalah salah satu Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Langnga yang terletak di Jl. Poros Langnga-Makoring, Kec.Mattirosompe, Kab.Pinrang. Dengan jumlah siswa yang terdaftar sebanyak Siswa Laki-laki : 77 dan Siswa Perempuan : 68. Adapun tenaga pendidik / pengajar sebanyak 10 orang.

4. SDN 53 Langnga

SDN 53 Langnga adalah salah satu Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Langnga yang terletak di Langnga, Kec.Mattirosompe, Kab.Pinrang. Dengan jumlah siswa yang terdaftar sebanyak Siswa Laki-laki : 119 dan Siswa Perempuan : 122. Adapun tenaga pendidik / pengajar sebanyak 17 orang.

B. Peranan Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah

Secara spesifik disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak, kewajiban pendidik, tenaga kependidikan, aparat negara atau masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak di dalam dan di lingkup satuan pendidikan dari tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain. Bagi mereka yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, mengakibatkan luka berat atau kematian juga tidak luput dari ancaman pidana penjara dan/atau denda.

Untuk mengetahui peranan undang-undang dalam perlindungan kekerasan anak di lingkungan sekolah maka peneliti melakukan penelitian di SDN sekelurahan Langnga, antara lain SDN 192 Langnga , SDN 52 Langnga , SDN 232 Langnga dan SDN 53 Langnga Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang , pada tanggal 17 juli sampai dengan Agustus. Untuk mendptakan data maka penulis memilih siswa secara acak dengan mengambil siswa siswa kelas 4, 5, dan 6 pada ke empat sekolah tersebut, Penulis memilih siswa atau anak di lingkungan berikut penulis gambarkan dalam bentuk tabel .

Tabel 1.

Jumlah siswa SDN sekelurahan Langnga

No.	Nama Sekolah	Jumlah Siswa			Jumlah
		Kelas 4	Kelas 5	Kelas 6	
1.	SDN 192 Langnga	20	23	21	64
2.	SDN 53 Langnga	21	24	39	84
3.	SDN 232 Langnga	19	18	18	55
4.	SDN 52 Langnga	23	23	21	67
Jumlah		83	88	99	270

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer 2017

Dari 270 siswa di SDN sekelurahan langnga. Penulis mengambil 10 orang siswa dari masing-masing sekolah sehingga sampel dari penelitian ini berjumlah 40 orang yang dipilih secara random atau acak.

Dari 40 orang tersebut diklasifikasikan kembali berdasarkan jenis kelamin dan kelas . Penulis membedakan antara siswa laki-laki dan perempuan karena tingkat kekerasan pada siswa juga dipengaruhi oleh jenis kelamin dari siswa dan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.a

Jumlah siswa berdasarkan Jenis kelamin dan Kelas

SDN 192 Langnga

No.	Jenis Kelamin	Kelas			Jumlah
		4	5	6	
1.	Laki-laki	2	2	0	4
2.	Perempuan	0	1	5	6
Jumlah		2	3	5	10

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer 2017

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah Anak laki-laki di kelas 4 adalah 2 orang, kelas 5 adalah 2 orang dan jumlah anak perempuan kelas 5 adalah 1 orang kelas 6 adalah 5 orang. Jumlah keseluruhan adalah 10 orang dari SDN 192 Langnga.

Tabel 2.b

Jumlah siswa berdasarkan Jenis kelamin dan Kelas

SDN 232 Langnga

No.	Jenis Kelamin	Kelas			Jumlah
		4	5	6	
1.	Laki-laki	0	2	0	2
2.	Perempuan	3	1	4	8
Jumlah		3	3	4	10

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer 2017

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah Anak laki-laki di kelas 5 adalah 2 orang dan jumlah anak perempuan kelas 4 adalah 3 orang, kelas 5 adalah 1 orang, kelas 6 adalah 4 orang. Jumlah keseluruhan adalah 10 orang dari SDN 232 Langnga.

Tabel 2.c

Jumlah siswa berdasarkan Jenis kelamin dan Kelas

SDN 53 Langnga

No.	Jenis Kelamin	Kelas			Jumlah
		4	5	6	
1.	Laki-laki	1	2	2	5
2.	Perempuan	2	1	2	5
Jumlah		3	3	4	10

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer 2017

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah Anak laki-laki di kelas 4 adalah 1 orang, kelas 5 adalah 2 orang, kelas 6 adalah 2 orang dan jumlah anak perempuan kelas 4 adalah 2 orang, kelas 5 adalah 1 orang, kelas 6 adalah 2 orang. Jumlah keseluruhan adalah 10 orang dari SDN 53 Langnga.

Tabel 2.d

Jumlah siswa berdasarkan Jenis kelamin dan Kelas

SDN 52 Langnga

No.	Jenis Kelamin	Kelas			Jumlah
		4	5	6	
1.	Laki-laki	0	0	0	0
2.	Perempuan	0	0	10	10
Jumlah		0	0	10	10

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer 2017

Berdasarkan data di atas dapat dilihat jumlah anak perempuan di kelas 6 adalah 10 orang. Maka jumlah keseluruhan adalah 10 orang dari SDN 52 Langnga.

Di masing-masing sekolah penulis menanyakan beberapa pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. Pertanyaan pertama, apakah tenaga pendidik pernah melakukan kekerasan psikis kepada anda.

Jawaban siswa terurai pada tabel berikut:

Tabel 3.

No.	Nama Sekolah	Jawaban			Jumlah
		Tidak pernah	Pernah	Sering	
1.	SDN 192 Langnga	10	0	0	10
2.	SDN 52 Langnga	9	1	0	10
3.	SDN 53 Langnga	8	2	0	10
4.	SDN 232 Langnga	9	1	0	10
Jumlah		36	4	0	40

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer 2017

Berdasarkan hasil uraian data diatas dapat dilihat bahwa 36 responden tidak pernah mendapatkan kekerasan psikis dari tenaga pendidik dan 4 orang pernah mendapatkan kekerasan psikis. Dari hasil data ini penulis mengetahui bahwa masih ada tenaga pendidik yang melakukan kekerasan psikis kepada anak .

Selanjutnya penulis menanyakan apakah tenaga pendidik pernah melakukan kekerasan fisik. Jawaban terurai di tabel sebagai berikut :

Tabel 4.

No.	Nama Sekolah	Jawaban			Jumlah
		Tidak pernah	Pernah	Sering	
1.	SDN 192 Langnga	10	0	0	10
2.	SDN 52 Langnga	9	1	0	10
3.	SDN 53 Langnga	6	3	1	10
4.	SDN 232 Langnga	2	8	0	10
Jumlah		27	12	1	40

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer 2017

Berdasarkan hasil uraian data diatas dapat dilihat bahwa 27 responden tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik dari tenaga pendidik,12 orang pernah dan 1 orang sering mendapatkan kekerasan fisik. Dari hasil data tersebut penulis mengetahui bahwa masih ada tenaga pendidik masih melakukan kekerasan fisik terhadap siswa.

Kekerasan dari guru ke siswa secara fisik mengakibatkan organ-organ tubuh siswa mengalami kerusakan seperti memar, luka-luka, dll.¹ Kekerasan fisik maupun kekerasan psikis dalam jangka pendek akan mempengaruhi konsentrasi, persepsi dan perilaku siswa. Sehingga tidak menutup kemungkinan siswa menjadi malas belajar atau bahkan malas sekolah yang berujung pada tidak naik kelasnya murid dan atau berhenti sekolah. Secara psikologis, kekerasan yang dilakukan guru terhadap muridnya akan menimbulkan trauma tersendiri bagi murid terhadap sosok guru dan terhadap instansi pendidikan.² Siswa, sebagai korban, kehilangan haknya atas pendidikan, dan haknya untuk bebas dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental yang tidak manusiawi. Martabat mereka direndahkan. Pertumbuhan dan perkembangan siswa akan terhambat.

Selanjutnya penulis menanyakan kamu pernah melakukan kekerasan psikis kepada temanmu . Jawaban terurai di tabel sebagai berikut :



¹Mudzakkir“Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Pada Siswa” *Guru Haus Ilmu*
<https://ideguru.wordpress.com/2010/04/25/faktor-faktor-penyebab-kekerasan-pada-siswa/> (Diakses Minggu 25 April 2010)

² Trius “Dampak dari terjadinya kekerasan guru terhadap muridnya” *Psikolog Malang*
<http://www.psikologmalang.com/2013/03/dampak-dari-terjadinya-kekerasan-guru.html?m=1>.
 (Diakses Rabu, 13 maret 2013)

Tabel 5.

No.	Nama Sekolah	Jawaban			Jumlah
		Tidak pernah	Pernah	Sering	
1.	SDN 192 Langnga	6	4	0	10
2.	SDN 52 Langnga	1	9	0	10
3.	SDN 53 Langnga	0	9	1	10
4.	SDN 232 Langnga	0	9	1	10
Jumlah		7	31	2	40

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer 2017

Berdasarkan hasil uraian data diatas dapat dilihat bahwa 7 responden tidak pernah melakukan kekerasan psikis kepada teman di sekolah, 31 orang pernah dan 2 orang sering melakukan kekerasan psikis kepada teman di sekolah. Anak melakukan kekerasan psikis kepada temannya dapat disebabkan karena Pola Asuh dari orang tua yang terlalu memanjakan atau bersifat keras kepada anak.

Pertanyaan selanjutnya, apakah anda pernah melakukan kekerasan fisik kepada teman anda. Jawaban terurai di tabel sebagai berikut :

Tabel 6.

No.	Nama Sekolah	Jawaban			Jumlah
		Tidak pernah	Pernah	Sering	
1.	SDN 192 Langnga	8	2	0	10
2.	SDN 52 Langnga	0	10	0	10
3.	SDN 53 Langnga	0	9	1	10
4.	SDN 232 Langnga	1	7	2	10
Jumlah		9	28	3	40

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer 2017

Berdasarkan hasil uraian data diatas dapat dilihat bahwa 9 responden tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada teman di sekolah, 28 orang pernah dan 3 orang sering melakukan kekerasan fisik kepada teman di sekolah. Dari hasil data tersebut penulis mengetahui bahwa siswa atau anak di lingkungan sekolah melakukan kekerasan fisik di lingkungan sekolah.

Pertanyaan selanjutnya menanyakan apakah teman anda pernah melakukan kekerasan Psikis kepada anda . Jawaban terurai di tabel sebagai berikut :

Tabel 7.

No.	Nama Sekolah	Jawaban			Jumlah
		Tidak pernah	Pernah	Sering	
1.	SDN 192 Langnga	0	10	0	10
2.	SDN 52 Langnga	0	10	0	10
3.	SDN 53 Langnga	0	8	2	10
4.	SDN 232 Langnga	0	10	0	10
Jumlah		0	38	2	40

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer 2017

Berdasarkan hasil uraian data diatas dapat dilihat bahwa tidak ada responden yang tidak pernah mendapatkan kekerasan psikis dari teman di sekolah, 38 orang pernah dan 2 orang sering melakukan kekerasan psikis kepada teman di sekolah. Dari hasil data tersebut penulis mengetahui bahwa siswa atau anak di lingkungan sekolah menganggap kekerasan psikis baik perempuan maupun laki-laki kelas 4, 5 dan 6

melakukan pernah melakukan kekerasan psikis kepada teman di sekolah. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan psikis adalah kekerasan yang perlu diberikan perlindungan sesuai dengan pasal 54 Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang kekerasan Anak di Lingkungan sekolah.

Pertanyaan selanjutnya apakah temanmu pernah melakukan kekerasan fisik kepada anda . Jawaban terurai di tabel sebagai berikut :

Tabel 8.

No.	Nama Sekolah	Jawaban			Jumlah
		Tidak pernah	Pernah	Sering	
1.	SDN 192 Langnga	6	4	0	10
2.	SDN 52 Langnga	0	8	2	10
3.	SDN 53 Langnga	0	7	3	10
4.	SDN 232 Langnga	0	10	0	10
Jumlah		6	29	5	40

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer 2017

Berdasarkan hasil uraian data diatas dapat dilihat bahwa 6 responden yang tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada teman di sekolah, 29 orang pernah dan 5 orang sering melakukan kekerasan psikis kepada teman di sekolah. Dari hasil data tersebut penulis mengetahui bahwa siswa atau anak di lingkungan sekolah selain mendapatkan kekerasan fisik siswa juga melakukan kekerasan fisik.

Berdasar hasil penelitian dari tabel 5., tabel 6., tabel 7., dan tabel 8. Penulis mendapatkan data bahwa selain menjadi korban kekerasan siswa juga menjadi pelaku kekerasan baik kekerasan psikis maupun kekerasan fisik.

Pertanyaan selanjutnya kekerasan apa yang sering terjadi di lingkungan sekolahmu. Jawaban terurai di tabel berikut :

Tabel 9.

No.	Nama Sekolah	Jawaban			Jumlah
		Fisik	Psikis	Seksual	
1.	SDN 192 Langnga	2	8	0	10
2.	SDN 52 Langnga	7	3	0	10
3.	SDN 53 Langnga	3	7	0	10
4.	SDN 232 Langnga	1	9	0	10
Jumlah		13	27	0	40

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer 2017

Pertanyaan selanjutnya kekerasan apa yang sering tindaklanjuti oleh pihak sekolah, masyarakat dan pihak lainnya (keluarga, aparat negara, dan/atau masyarakat) di lingkungan sekolahmu. Jawaban terurai di tabel berikut :

Tabel 10.

No.	Nama Sekolah	Jawaban			Jumlah
		Fisik	Psikis	Seksual	
1.	SDN 192 Langnga	8	2	0	10
2.	SDN 52 Langnga	9	1	0	10
3.	SDN 53 Langnga	9	1	0	10
4.	SDN 232 Langnga	4	6	0	10
Jumlah		30	10	0	40

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer 2017

Pertanyaan selanjutnya kekerasan apa yang sering diabaikan oleh pihak sekolah, masyarakat dan pihak lainnya (keluarga, aparat negara, dan/atau masyarakat) di lingkungan sekolahmu. Jawaban terurai di tabel berikut :

Tabel 11.

No.	Nama Sekolah	Jawaban			Jumlah
		Fisik	Psikis	Seksual	
1.	SDN 192 Langnga	4	6	0	10
2.	SDN 52 Langnga	0	10	0	10
3.	SDN 53 Langnga	0	10	0	10
4.	SDN 232 Langnga	1	9	0	10
Jumlah		5	35	0	40

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer 2017

Pertanyaan selanjutnya apabila terjadi kekerasan di sekolahmu kepada siapakah anda melapor . Jawaban terurai di tabel berikut :

Tabel 12.

No.	Nama Sekolah	Jawaban						Jumlah
		Teman	Orang Tua	Guru	Kepala Sekolah	Aparat negara	Tidak melapor	
1.	192	0	0	9	0	0	1	10
2.	52	0	0	6	4	0	0	10
3.	53	1	0	8	0	0	1	10
4.	232	0	0	7	2	0	1	10
Jumlah		1	0	30	6	0	3	40

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer 2017

Berdasarkan hasil uraian data diatas dapat dilihat bahwa 1 orang responden melaporkan kekerasan kepada teman, 30 orang kepada guru, 6 orang kepada kepala sekolah dan 3 orang tidak melapor. Dari hasil data tersebut penulis mengetahui bahwa Guru dan atau Kepala Sekolah berperan penting untuk menndak lanjuti kekerasan yang ada di sekolah. Namun masih ada juga siswa yang mengabaikan atau tidak melaporkan kekerasan pada siapapun dan siswa juga menjadikan teman sebagai tempat bercerita.

Berdasarkan hasil uraian data dari empat tabel diatas yaitu tabel 8-11 dapat dilihat bahwa kekerasan psikis adalah kekerasan yang paling sering terjadi namun yang sering kali ditindak lanjuti adalah kekerasan fisik dan yang terabaikan adalah

kekerasan psikis sesuai dengan undang-undang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah anak dilindungi dari kekerasan fisik maupun kekerasan psikis.

Selain melakukan questioner kepada anak atau siswa. Penulis melakukan wawancara kepada pihak sekolah dengan pertanyaan. Mengapa ibu lebih banyak menangani kekerasan Fisik daripada kekerasan psikis siswa?

“Yaa kekerasan fisik karena kalau sibombe itu anak-anak baru mau ditangani sudah baku temammi lagi, contohnya baru-baru ini ada yang hampir na pisau temannya sendiri tapi beruntung sebelum terjadi kami dari pihak sekolah sudah mendapat laporan jadi cepat kami tangani”³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dikaitkan dengan tabel 8, tabel 9 Dan tabel 10. Penulis mendapatkan data bahwa pihak sekolah lebih memerhatikan kekerasan Fisik daripada kekerasan Psikis. Sedangkan pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak, kewajiban pendidik, tenaga kependidikan, aparat atau masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak di dalam dan di lingkup satuan pendidikan dari tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain. Anak di Lingkungan sekolah baik itu dari kekerasan fisik maupun psikis harus diberikan perlindungan.

Sedangkan siswa yang mengalami tindakan kekerasan tanpa ada penanggulangan, bisa saja menarik diri dari lingkungan pergaulan, karena takut,

³ Hasil wawancara dengan Ibu Rita, kepala sekolah SDN 53 Langnga, Kamis 27 Juli 2017 Pukul 11.00 WITA

merasa terancam dan merasa tidak bahagia berada diantara teman-temannya. Mereka juga jadi pendiam, sulit berkomunikasi baik dengan guru maupun dengan sesama teman. Bisa jadi mereka jadi sulit mempercayai orang lain, dan semakin menutup diri dari pergaulan.

Pertanyaan selanjutnya manakah tindakan guru yang anda pilih apabila melakukan kekerasan fisik. Jawaban terurai di tabel berikut :

Tabel 13.

No.	Nama Sekolah	Jawaban			Jumlah
		Dihukum	Dinasehati	Dibiarkan	
1.	SDN192 LANGNGA	0	10	0	10
2.	SDN 52 LANGNGA	0	10	0	10
3.	SDN 53 LANGNGA	1	9	0	10
4.	SDN 232 LANGNGA	4	6	0	10
Jumlah		5	35	0	40

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer 2017

Berdasarkan tabel diatas jawaban apabila siswa melakukan kekerasan fisik yaitu 5 responden memilih dihukum, 35 dinasehati dan tidak ada yang ingin dibiarkan. Dari hasil data tersebut penulis mengetahui bahwa anak beberapa anak apabila melakukan kekerasan fisik memilih dihukum atau membenarkan kekerasan ada disekolah dengan alasan pertanggungjawaban atas kesalahannya dan sebagian

lagi memilih untuk dinasehati dan tidak ada anak yang memilih dibiarkan saat melakukan kekerasan fisik.

Pertanyaan selanjutnya manakah tindakan guru yang anda pilih apabila melakukan kekerasan Psikis. Jawaban terurai di tabel berikut:

Tabel 14.

No.	Nama Sekolah	Jawaban			Jumlah
		Dihukum	Dinasehati	Dibiarkan	
1.	SDN192 LANGNGA	0	10	0	10
2.	SDN 52 LANGNGA	0	10	0	10
3.	SDN 53 LANGNGA	0	6	4	10
4.	SDN 232 LANGNGA	3	7	0	10
Jumlah		3	33	4	40

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer 2017

Berdasarkan tabel diatas jawaban apabila siswa melakukan kekerasan psikis 3 responden memilih dihukum, 33 dinasehati dan 4 orang memilih dibiarkan. Dari hasil data tersebut penulis mengetahui bahwa anak beberapa anak apabila melakukan kekerasan psikis memilih dihukum atau membenarkan kekerasan ada disekolah dengan alasan pertanggungjawaban atas kesalahannya dan sebagian lagi memilih untuk dinasehati dan ada juga anak memilih untuk dibiarkan dan membenarkan kekerasan psikis.

Selain melakukan Kuesioner Penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah Di SDN se-kelurahan Langnga Untuk mengetahui bagaimana peranan Hukum perlindungan anak di Lingkungan sekolah. Penulis mengajukan pertanyaan , tindakan apa yang tenaga pendidik dilakukan kekerasan di sekolah?

“Kami akan tetap menasihati anak-anak dan kekerasan di sekolah diselesaikan di sekolah.. kami tidak akan melibatkan pihak lain seperti orang tua karena saat disekolah anak-anak atau siswa adalah anak kami dan tanggung jawab kami”⁴

“Dinasehati... kalau kekerasannya terjadi anak kami panggil lalu ditindaklanjuti kalau belum selesai baru kami panggil orang tuanya”⁵

“Kami nasehati anak-anak karena anak-anak kalau dikerasi semakin keras kalau itu terjadi antara Tenaga Pendidik kami panggil lalu kembali memberikan pemahaman tentang Undang-undang Perlindungan Anak juga HAM beda sama 11-12 tahun lalu saya waktu jadi guru masih bebas mengerasi anak-anak bandel”⁶

“Kalau disini jarang ada kekerasan antara guru dan anak yang adda anantara anak biasanya saya mengancam dengan Ancaman akan saya laporkan ke kantor polisi”⁷

Berdasarkan hasil Wawancara mengenai penanganan yang dilakukan apabila terjadi kekerasan Jawaban dari Kepala Sekolah sudah sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak, kewajiban pendidik, tenaga kependidikan, aparat atau masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak

4 Hasil wawancara dengan bapak mansur, kepala sekolah SDN 192 Langnga, Senin 24 Juli 2017 Pukul 09.00 WITA

5 Hasil wawancara dengan bapak Abdul Hakim, kepala sekolah SDN 232 Langnga, Kamis 27 Juli 2017 Pukul 09.00 WITA

6 Hasil wawancara dengan Ibu Rita, kepala sekolah SDN 53 Langnga, Kamis 27 Juli 2017 Pukul 11.00 WITA

7 Hasil wawancara dengan Ibu Hermin, kepala sekolah SDN 192 Langnga, Kamuis 27 Juli 2017 Pukul 16.00 WITA

di dalam dan di lingkup satuan pendidikan dari tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.

C. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Implementasi Perlindungan Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah

1. Faktor-faktor yang mendukung implementasi perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah.

Menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah Suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Adanya perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dalam konteks pencegahan kejahatan anak sebagai usaha perlindungan anak, yang menjadi pusat perhatian adalah segala kegiatan maupun usaha-usaha melakukan perlindungan anak dalam salah satu aspeknya, yaitu pencegahan kejahatan anak yang meliputi berbagai bidang kehidupan yang menyangkut kepentingan anak dan anggota masyarakat lainnya serta melibatkan partisipasi dari semua pihak.

Pencegahan dimaksud adalah usaha-usaha yang dilakukan dengan berbagai cara agar perbuatan kejahatan apapun tidak sempat dilakukan, dengan pengertian bahwa perlindungan tersebut adalah dengan menciptakan kondisi yang baik agar anak

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena pada dasarnya suatu pencegahan adalah lebih baik daripada melakukan perbaikan, penyembuhan maupun penindakan.

Berdasarkan petunjuk khusus tentang Operasi Penerangan INPRES Nomor 6 Tahun 1971 mengenai kenakalan remaja, usaha pencegahan (preventif) tersebut meliputi:

- a. Usaha-usaha pencegahan bersifat umum
 - 1) Usaha pembinaan anak berupa:
 - a) Pemberian pendidikan pranatal kepada orangtua terutama calon ibu anak,
 - b) Pemberian pendidikan agama, pendidikan mental dan budi pekerti serta pengetahuan kecerdasan dan ketrampilan yang cukup kepada pribadi anak dalam keluarga,
 - c) Pemberian pendidikan pribadi anak dalam sekolah, masyarakat.
 - d) Pemberian pendidikan kepada pribadi anak dalam masyarakat.
 - 2) Usaha perbaikan, usaha perbaikan lingkungan dan kondisi sosial yang ditujukan kepada tercapainya situasi dan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat:
 - a) Usaha perbaikan dalam keluarga,
 - b) Usaha perbaikan dalam sekolah,
 - c) Usaha perbaikan dalam masyarakat.
 - 3) Usaha pengadaan sarana vital sebagai penunjang bagi usaha-usaha pembinaan pribadi anak dan usaha perbaikan lingkungan dan kondisi sosial.
 - b. Usaha-usaha pencegahan yang bersifat khusus

- 1) Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku dan perbuatan anak dan lingkungannya
- 2) Bimbingan dan penyuluhan secara intensif terhadap orangtua dan anak agar orangtua dapat membimbing dan mendidik anak-anaknya secara sungguh-sungguh dan cepat agar supaya anak tetap bertingkah laku yang wajar.⁸

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung implementasi perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah dengan mengajukan pertanyaan yaitu , bagaimanakah pencegahan yang dilakukan oleh tenaga pendidik agar tidak terjadi kekerasan di lingkungan sekolah?

“Setiap upacara maupun proses pembelajaran saya selalu menekankan kepada anak didik saya untuk saling menyayangi satu sama lain begitu juga dengan guru apabila anak-anak melakukan kesalahan , jangan dipukul.. dinasehati terus supaya anak-anak juga merasa aman di lingkungan sekolah”⁹

“Ada yang namanya penanaman karakter dek memang diberikan , itu memang sudah jadi program proses belajar .. begitu juga dengan guru-guru di sekolah pelajaran pendidikan agama dimana agama mengajarkan untuk selalu bersifat lemah lembut”¹⁰

“Di sekolah ini ada perbedaan kelas A dan B karena tidak kita pungkiri adanya perbedaan dari anak-anak sendiri untuk meminimalisir terjadinya kekerasan di sekolah dan ada yang namanya penanaman karakter”¹¹

“Saya selalu melakukan komunikasi dan menyampaikan dengan guru-guru maupun anak-anak untuk tidak melakukan kekerasan karena memang Undang-undang maupun HAM sudah mengatur itu”¹²

⁸ Budiyanto,S.H.,M.H “Masalah Perlindungan Dan Usaha Pencegahan Kejahatan Anak” <https://budi399.wordpress.com/2009/10/20/Perlindungan-Anak/>.(20 Oktober 2009).

⁹ Hasil wawancara dengan bapak mansur, kepala sekolah SDN 192 Langnga, Senin 24 Juli 2017 Pukul 09.00 WITA

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Abdul Hakim, kepala sekolah SDN 232 Langnga, Kamis 27 Juli 2017 Pukul 09.00 WITA

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Rita, kepala sekolah SDN 53 Langnga, Kamis 27 Juli 2017 Pukul 11.00 WITA

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pencegahan yang dilakukan oleh tenaga pendidik agar tidak terjadi kekerasan di lingkungan sekolah setiap Kepala Sekolah selaku tenaga kependidikan memiliki cara masing-masing agar kekerasan di Lingkungan sekolah dapat diterapkan dengan berpedoman pada Undang-undang perlindungan anak agar anak dapat diberikan perlindungan sebagaimana dalam undang-undang perlindungan anak pasal 54.

2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah

Sebelum mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah penulis menjelaskan Penyebab Kekerasan dalam dunia pendidikan¹³ Kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

a. Dari Guru

Ada beberapa faktor yang menyebabkan guru melakukan kekerasan pada siswanya, yaitu:

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Hermin, kepala sekolah SDN 192 Langnga, Kamuis 27 Juli 2017 Pukul 16.00 WITA

¹³ Mudzakkir, “Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Pada Siswa” <https://Ideguru.Wordpress.Com/2010/04/25/Faktor-Faktor-Penyebab-Kekerasan-Pada-Siswa/>. (25 April 2010)

- 1) Kurangnya pengetahuan bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis tidak efektif untuk memotivasi siswa atau merubah perilaku, malah beresiko menimbulkan trauma psikologis dan melukai harga diri siswa.
- 2) Persepsi yang parsial dalam menilai siswa. Bagaimana pun juga, setiap anak punya konteks kesejarahan yang tidak bisa dilepaskan dalam setiap kata dan tindakan yang terlihat saat ini, termasuk tindakan siswa yang dianggap “melanggar” batas. Apa yang terlihat di permukaan, merupakan sebuah tanda / sign dari masalah yang tersembunyi di baliknya. Yang terpenting bukan sebatas “menangani” tindakan siswa yang terlihat, tapi mencari tahu apa yang melandasi tindakan / sikap siswa.
- 3) Adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga guru ybs menjadi lebih sensitif dan reaktif.
- 4) Adanya tekanan kerja : target yang harus dipenuhi oleh guru, baik dari segi kurikulum, materi maupun prestasi yang harus dicapai siswa didiknya sementara kendala yang dirasakan untuk mencapai hasil yang ideal dan maksimal cukup besar.
- 5) Pola authoritarian masih umum digunakan dalam pola pengajaran di Indonesia. Pola authoritarian mengedepankan faktor kepatuhan dan ketaatan pada figure otoritas sehingga pola belajar mengajar bersifat satu arah (dari guru ke murid). Implikasinya, murid kurang punya kesempatan untuk berpendapat dan berekspresi. Dan, pola ini bisa berdampak negatif jika dalam diri sang guru terdapat *insecurity* yang berusaha di kompensasi lewat penerapan kekuasaan.

6) Muatan kurikulum yang menekankan pada kemampuan kognitif dan cenderung mengabaikan kemampuan afektif (Rini, 2008). Tidak menutup kemungkinan suasana belajar jadi “kering” dan stressful, dan pihak guru pun kesulitan dalam menciptakan suasana belajar mengajar yang menarik, padahal mereka dituntut mencetak siswa-siswa berprestasi.

b. Dari siswa

Salah satu factor yang bisa ikut mempengaruhi terjadinya kekerasan, adalah dari sikap siswa tersebut. Sikap siswa tidak bisa dilepaskan dari dimensi psikologis dan kepribadian siswa itu sendiri. Kecenderungan *sadomasochism* tanpa sadar bisa melandasi interaksi antara siswa dengan pihak guru, teman atau kakak kelas atau adik kelas. Perasaan bahwa dirinya lemah, tidak pandai, tidak berguna, tidak berharga, tidak dicintai, kurang diperhatikan, rasa takut diabaikan, bisa saja membuat seorang siswa *clinging* pada *powerful / authority figure* dan malah “memancing” orang tersebut untuk *actively responding to his / her need* meskipun dengan cara yang tidak sehat. Contohnya, tidak heran jika anak berusaha mencari perhatian dengan bertingkah yang memancing amarah, agresifitas, atau pun hukuman. Tapi, dengan demikian, tujuannya tercapai, yakni mendapat perhatian. Sebaliknya, bisa juga perasaan inferioritas dan tidak berharga di kompensasikan dengan menindas pihak lain yang lebih lemah supaya dirinya merasa hebat.

c. Dari Keluarga

Kekerasan yang dilakukan baik oleh guru maupun siswa, perlu juga dilihat dari factor kesejarahan mereka.

1) Pola Asuh

- a) Anak yang dididik dalam pola asih yang *indulgent, highly privilege* (orang tua sangat memanjakan anak dan memenuhi semua keinginan anak), tumbuh dengan *lack of internal control and lack of sense of responsibility*. Mengapa? Dengan memenuhi semua keinginan dan tuntutan mereka, anak tidak belajar mengendalikan *impulse*, menyeleksi dan menyusun skala prioritas kebutuhan, dan bahkan tidak belajar mengelola emosi. Ini jadi bahaya karena anak merasa jadi raja dan bisa melakukan apa saja yang ia inginkan dan bahkan menuntut orang lain melakukan keinginannya. Jadi anak akan memaksa orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dengan cara apapun juga asalkan tujuannya tercapai. Anak juga tak memiliki *sense of responsibility* karena kemudahan yang ia dapatkan, membuat anak tidak berpikir *action-consequences*, aksi reaksi, kalau mau sesuatu ya harus berusaha. Anak di sekolah ingin dapat nilai bagus tapi tidak mau belajar, akhirnya mencontek, atau memaksa siswa lain memberi contekan dengan ancaman atau pun *bribe*.
- b) Orang tua yang *emotionally or physically uninvolved*, bisa menimbulkan persepsi pada anak bahwa mereka tidak dikehendaki, jelek, bodoh, tidak baik, dsb. Kalau situasi ini tidak sempat diperbaiki, bisa menimbulkan dampak psikologi, yakni munculnya perasaan *inferior, rejected*, dsb. *Unresolved feeling of emotionally – physically rejected*, membuat anak memilih untuk jadi bayang-bayang orang lain, *clinging to strong identity* meskipun sering jadi

bahan tertawaan atau hinaan, disuruh-suruh. Atau, anak cenderung menarik diri dari pergaulan, jadi pendiam, pemurung atau penakut hingga memancing pihak *aggressor* untuk menindas mereka. Sebaliknya, orang tua yang terlalu *rigid* dan *authoritarian*, tidak memberikan kesempatan pada anaknya untuk berekspresi, dan lebih banyak mengkritik, membuat anak merasa dirinya “*not good enough*” person, hingga dalam diri mereka bisa tumbuh inferioritas, dependensi, sikapnya penuh keraguan, tidak percaya diri, rasa takut pada pihak yang lebih kuat, sikap taat dan patuh yang irrasional, dsb. Atau, anak jadi tertekan, karena harus menahan semua gejolak emosi, rasa marah, kecewa, sedih, sakit hati – tanpa ada jalan keluar yang sehat. Lambat laun tekanan emosi itu bisa keluar dalam bentuk agresivitas yang diarahkan pada orang lain.

2) Orangtua mengalami masalah psikologis

Jika orangtua mengalami masalah *psikologis* yang berlarut-larut, bisa mempengaruhi pola hubungan dengan anak. Misalnya, orang tua yang *stress* berkepanjangan, jadi sensitif, kurang sabar dan mudah marah pada anak, atau melampiaskan kekesalan pada anak. Lama kelamaan kondisi ini mempengaruhi kehidupan pribadi anak. Ia bisa kehilangan semangat, daya konsentrasi, jadi sensitif, reaktif, cepat marah, dsb.

3) Keluarga disfungsional

Keluarga yang mengalami disfungsi punya dampak signifikan terhadap sang anak. Keluarga yang salah satu anggotanya sering memukul, atau menyiksa fisik atau emosi, intimidasi anggota keluarga lain; atau keluarga yang sering konflik terbuka tanpa ada resolusi, atau masalah berkepanjangan yang dialami oleh keluarga hingga menyita energy psikis dan fisik, hingga mempengaruhi interaksi, komunikasi dan bahkan kemampuan belajar, kemampuan kerja beberapa anggota keluarga yang lain. Situasi demikian mempengaruhi kondisi emosi anak dan lebih jauh mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Sering dijumpai siswa “bermasalah”, setelah diteliti ternyata memiliki latar belakang keluarga yang disfungsional.

d. Dari Lingkungan

Tak dapat dipungkiri bahwa kekerasan yang terjadi selama ini juga terjadi karena adanya faktor lingkungan, yaitu:

- 1) Adanya budaya kekerasan : seseorang melakukan kekerasan karena dirinya berada dalam suatu kelompok yang sangat toleran terhadap tindakan kekerasan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan tersebut memandang kekerasan hal yang biasa / wajar.
- 2) Mengalami sindrom *Stockholm* : Sindrom Stockholm merupakan suatu kondisi psikologis dimana antara pihak korban dengan pihak *aggressor* terbangun hubungan yang positif dan *later on* korban membantu *aggressor* mewujudkan keinginan mereka. Contoh, kekerasan yang terjadi ketika mahasiswa senior melakukan kekerasan pada mahasiswa baru pada masa orientasi bersama terjadi

karena mahasiswa senior meniru sikap seniornya dulu dan dimasa lalunya juga pernah mengalami kekerasan pada masa orientasi

- 3) Tayangan televisi yang banyak berbau kekerasan : Jika seseorang terlalu sering menonton tayangan kekerasan maka akan mengakibatkan dirinya terdorong untuk mengimitasi perilaku kekerasan yang ada di televisi. Sebab, dalam tayangan tersebut menampilkan kekerasan yang diasosiasikan dengan kesuksesan, kekuatan dan kejayaan seseorang. Akibatnya, dalam pola berpikir muncul premis bahwa jika ingin kuat dan ditakuti, pakai jalan kekerasan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada masing-masing Kepala sekolah SDN di Kelurahan Langnga.

Mengapa Undang-undang sudah memberikan perlindungan anak di lingkungan sekolah namun tetap saja terjadi kekerasan baik sesama siswa maupun dengan tenaga pendidik. Dari hasil wawancara oleh Kepala sekolah di SDN 192 Langnga yang bernama Bapak Mansur , mengatakan bahwa:¹⁴

“Kekerasan di lingkungan sekolah masih sering terjadi karena faktor anak dari luar yaitu dari lingkungan mainnya atau memang dari didikan keluarganya sendiri”

Sedangkan Dari hasil wawancara oleh Kepala sekolah di SDN 232 Langnga yang bernama Bapak Abul Hakim, yang mengatakan bahwa:¹⁵

“Tidak adanya kerjasama antara semua pihak seperti orang tua, guru dan juga siswa untuk menghindari kekerasan di lingkungan sekolah”

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak mansur, kepala sekolah SDN 192 Langnga, Senin 24 Juli 2017 Pukul 09.00 WITA

¹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Abdul Hakim, kepala sekolah SDN 232 Langnga, Kamis 27 Juli 2017 Pukul 09.00 WITA

Dari hasil wawancara oleh Kepala sekolah di SDN 53 Langnga yang bernama Ibu Rita, yang mengatakan bahwa:¹⁶

“Menurut ibu’ sifat anak-anak sendiri yang memang begitu yah ... mungkin diambil dari lingkungan, saat penerimaan Siswa baru saya selalu menyampaikan kepada orang tua siswa agar membantu kami guru-guru dalam mendidik anak baik sifat dan untuk pembelajaran di sekolah”

Dari hasil wawancara oleh Kepala sekolah di SDN 52 Langnga yang bernama Bapak Hermin, yang mengatakan bahwa:¹⁷

“Kenapa anak-anak tetap mendapatkan kekerasan di lingkungan sekolah itu baik dari guru maupun anak-anak karena sifat anak-anak sendiri yang membuat kesal gurunya sehingga memancing terjadinya kekerasan juga anak-anak yang pernah melakukan kekerasan kepada teman adalah anak-anak yang akan mendapatkan kekerasan karena sifat *mau dibilang* anak-anak itu sendiri, begitu nak”

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis mendapatkan jawaban Mengapa Undang-undang sudah memberikan perlindungan anak di lingkungan sekolah namun tetap saja terjadi kekerasan baik sesama siswa maupun dengan tenaga pendidik disebabkan dari faktor anak itu sendiri, lingkungannya maupun dari orang tua yang kurang memperhatikan anak.

Pertanyaan selanjutnya, apakah kekerasan di Lingkungan sekolah sewaktu-waktu dapat diterapkan. Dari hasil wawancara oleh Kepala sekolah di SDN 192 Langnga yang bernama Bapak Mansur , mengatakan bahwa:¹⁸

“Saya berpedoman pada Undang-undang perlindungan anak dengan tidak menerapkan dan membenarkan kekerasan sama sekali”.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Rita, kepala sekolah SDN 53 Langnga, Kamis 27 Juli 2017 Pukul 11.00 WITA

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Hermin, kepala sekolah SDN 192 Langnga, Kamuis 27 Juli 2017 Pukul 16.00 WITA

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak mansur, kepala sekolah SDN 192 Langnga, Senin 24 Juli 2017 Pukul 09.00 WITA

Sedangkan Dari hasil wawancara oleh Kepala sekolah di SDN 232 Langnga yang bernama Bapak Abul Hakim, yang mengatakan bahwa:¹⁹

“Kekerasan di lingkungan sekolah sama sekali tidak dibutuhkan karena sekolah adalah lembaga pendidikan tempat untuk mendidik ”.

Dari hasil wawancara oleh Kepala sekolah di SDN 53 Langnga yang bernama Ibu Rita, yang mengatakan bahwa:²⁰

“Menurut saya perlu, karena memang ada anak-anak yang harus dikerasi sesuai dengan karakter anak-anak itu sendiri agar memberikan efek jera”.

Dari hasil wawancara oleh Kepala sekolah di SDN 52 Langnga yang bernama Bapak Hermin, yang mengatakan bahwa:²¹

“Jujur saja saya masih memberikan kekerasan fisik kepada anak-anak dikarenakan anak-anak memang mebutuhkan itu menurut saya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas tentang apakah kekerasan sewaktu-waktu dapat diterapkan. Penulis mendapatkan data masih ada tenaga pendidik yang membenarkan kekerasan di lingkungan sekolah dengan alasan kekerasan bisa membentuk karakter anak yang lebih baik. Meski pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak, kewajiban pendidik, tenaga kependidikan, aparat atau masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak di dalam dan di lingkup satuan pendidikan dari tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan kejahatan lainnya

¹⁹ Hasil wawancara dengan bapak Abdul Hakim, kepala sekolah SDN 232 Langnga, Kamis 27 Juli 2017 Pukul 09.00 WITA

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Rita, kepala sekolah SDN 53 Langnga, Kamis 27 Juli 2017 Pukul 11.00 WITA

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Hermin, kepala sekolah SDN 192 Langnga, Kamuis 27 Juli 2017 Pukul 16.00 WITA

yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan hukum terhadap Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah Sesuai pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah diterapkan di setiap sekolah SDN se-kelurahan Langnga namun kekerasan di Sekolah masih terjadi baik psikis maupun fisik baik antar siswa maupun dari tenaga kependidikan. Sebagian dari tenaga kependidikan selaku salah satu pemberi perlindungan juga menjadi pelaku kekerasan terhadap anak dengan tetap memberikan hukuman ringan (kekerasan fisik) kepada anak yang berulang kali melakukan kekerasan dengan alasan untuk memberikan efek jera pada anak. Kekerasan ini tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan di lingkungan sekolah karena kekerasan yang dilakukan guru atau tenaga kependidikan dilakukan dengan alasan sebagai salah satu cara agar anak dapat dididik untuk menjadi patuh dan tidak melakukan kekerasan yang sama berulang kali. Dan kekerasan antar siswa juga masih terjadi baik fisik maupun psikis karena dari dimensi psikologis dan kepribadian itu sendiri. Kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah adalah kekerasan psikis antar siswa.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah:

Adapun Faktor-faktor yang mendukung implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah yaitu dengan menerapkan sekolah tanpa kekerasan, pelajaran pendidikan agama yang mengajarkan berperilaku lemah lembut, pencegahan dengan melakukan penanaman karakter baik siswa maupun tenaga kependidikan.

Sedangkan faktor yang menghambat implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah:

1. Kurangnya pengetahuan dari guru atau tenaga kependidikan bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis tidak selalu efektif untuk siswa baik itu dipengaruhi oleh karena adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga tenaga kependidikan menjadi lebih sensitif dan reaktif, adanya tekanan kerja dan pola authoritarian masih umum digunakan dalam pola pengajaran di Indonesia.
2. Siswa yang memiliki sifat yang cenderung lemah biasanya membuat siswa yang lebih kuat untuk melakukan kekerasan terhadap siswa yang lemah agar dirinya merasa hebat. Kedua sikap ini dapat dipengaruhi oleh pola asuh keluarga maupun dari lingkungan anak.

B. Saran

1. Sebaiknya sekolah menerapkan pendidikan tanpa kekerasan, dengan tidak hanya menekankan kemampuan kognitif namun juga memerhatikan kemampuan afektif dan kemampuan psikomotorik anak agar anak tidak hanya berpengetahuan namun juga sekolah memerhatikan keterampilan anak. Dan anak tidak hanya pintar namun juga memiliki sikap yang baik.
2. Sebaiknya Orang Tua memberikan perhatian lebih pada anak dan kasih sayang agar anak menjadi penyayang dan tidak melakukan kekerasan terhadap siapapun.
3. Untuk siswa yang mengalami kekerasan Segera *sharing* pada orangtua atau guru atau orang yang dapat dipercaya mengenai kekerasan yang dialaminya sehingga siswa tersebut segera mendapatkan pertolongan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikisnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010)
- Diah Anjar Yanit, Mieke, dkk., *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Propinsi Jateng : Bapenas, 2006.
- E. Greydanus, Donald. *Korporal Punishment in School, Journal of Health*, New York : Elsevier inc, 2003.
- Galtung, Johan. *Kekuasaan dan Kekerasan*, Yogyakarta : Kanisius, 1992.
- Hurairah Abu, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Bandung : Nuansa (Anggota IKAPI) 2006.
- Mufidah. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*, Papringan : Pilar Media (Anggota IKAPI), 2006.
- Musthafa , Bacharudin. *Education Reform (The Case of Indonesia), The Republic of Indonesia and The World Bank*, Jakarta, 2001.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia*, , Jakarta : Raja Grafindo, 2011.
- Poerwadarminta , W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. P.N Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* , Jakarta: Granit, 2010.
- Santoso, Topo. *Kriminologi*. Jakarta : Grafindo Persada, 2002.
- Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Bandung : Politea, 1987.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea, 1991.
- Setyowati Soemitro, Irma. *Aspek Hukum Perlindungan Anak* , Jakarta : Bumi Aksara, 1990.

Umar Sa'abah, Marzuki. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta : UII Press.

B. Online

Budiyanto,S.H,.M.H “Masalah Perlindungan Dan Usaha Pencegahan Kejahatan Anak” <https://budi399.wordpress.com/2009/10/20/Perlindungan-Anak/>.(20 Oktober 2009).

Fikri , Nurul . “kekerasan pada anak didik “ ragam media kolom-kolom siswa <http://nurulfikri.sch.id/index.php/ragam-media/kolom/kolom-siswa/143> kekerasan-pada-anak-didik-di-sekolah.diakses tanggal (5 Maret 2013)

http://www.masibied.com/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurut-para-ahli#_ftn2 diaksestanggal (3 April 2013)

Mudzakkir, “Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Pada Siswa” <https://Ideguru.Wordpress.Com/2010/04/25/Faktor-Faktor-Penyebab-Kekerasan-Pada-Siswa/>.(25April 2010)

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi

Ilmu Hukum

Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Di

Samata-Gowa

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DASTINA
NIM : 10500113285
Semester/Klpk : VIII (Delapan)/F
Angkatan : 2013

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Phedofilia di Indonesia
2. Implementasi pasal 51 UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan anak dalam lingkungan sekolah (studi di sekolah dasar sekelurahan langga kecamatan mattirosompe kabupaten pinrang)
3. Perlindungan hukum terhadap Pekerja Seks Komersial (Studi kasus Makassar).

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Samata, 7 April 2017

Pemohon,

(DASTINA)

13 APR 2017

RAHMAN SYAMSUDDIN, SH., MH.
NIP. 19821207 200901 1 010

(Dr. Andi Saftiani, SH., MH)

Penasehat Akademik

Mengetahui,

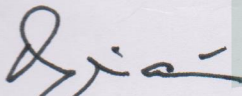
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi saudara **Dastina**, NIM : 10500113285 mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul ; **"Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Dilingkungan Sekolah"** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk diajukan

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut.

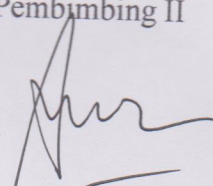
Samata, 07 Agustus 2017

Pembimbing I



Dr. Andi Safriani, S.H., M.H
NIP. 19831122 200912 2 002

Pembimbing II



Muhammad Anis, S.Ag., M.H
NIP. 19660816 201411 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 804 Tahun 2017
TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang :**
- Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
 - Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.

- Mengingat :**
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
 - Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
 - Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Menunjuk saudara :
 1. Dr. Andi safriani., SH., MH
 2. Muhammad Anis., S.Ag., MH

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Dastina
N I M : 10500113285
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang No. 35 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus di Sekolah Dasar Sekelurahan Langnga Kec. Mattirosompe Kab. Pinrang)

- Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017
- Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 20 Juni 2017
Dekan

Prof. Dr. Darussalam Svamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Nomor : SLI/PP.00.9/ 707/2017
Sifat : Penting
Lamp :
Hal : UNDANGAN SEMINAR HASIL

Samata, 11 Agustus 2017

Kepada

- Yth. 1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (Ketua)
2. Istiqamah, S.H.,M.H. (Sekretaris)
3. Azhar Sinilele, S.H.,M.H. (Penguji I)
4. Erlina, S.H.,M.H. (Penguji II)
5. Dr. Andi Safriani, M.H. (Pembimbing I)
6. Muh. Anis, M.H. (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Dastina
N I M : 10500113285
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin , 14 Agustus 2017
Waktu : Pukul 10.00 – 11.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan IH

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

DRAFT SKRIPSI

**Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak Terhadap Kekerasan Anak Dilingkungan Sekolah**

Disusun dan Diajukan oleh

Dastina

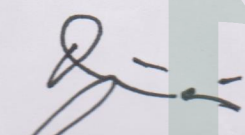
NIM : 10500113285

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan

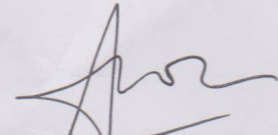
Penulisan skripsi

Pada tanggal : 5 Agustus 2017

Pembimbing 1


Dr. Andi Safriani, S.H., M.H
NIP. 19831122 200912 2 002

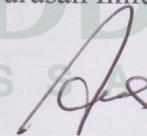
Pembimbing II


Muhammad Anis, S.Ag., M.H
NIP. 19660816 201411 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

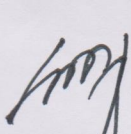
ALAUDDIN
MAKASSAR

Diketahui Oleh :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Istiqamah, SH., MH
NIP: 19680120 199503 2 001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP : 19621016 199003 1 003

Nomor : 2215/SL.1/PP.00.9/07/2017
Lamp : 1 (satu) exemplar
Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Samata, 7 Juli 2017

Kepada
Yth. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi- Selatan
Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sulawesi- Selatan

Di-
Makassar

Assalamu 'AlaikumWr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Dastina
N I M : 10500113285
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Asrama PIBA Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Adapun Judul Skripsi yaitu :

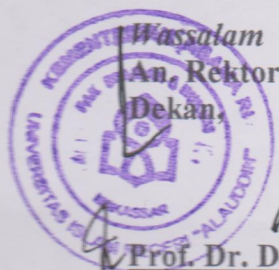
"Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah Studi Kasus di Sekolah Dasar Sekelurahan Langnga Kec.Mattirosompe Kab.Pinrang"

Dengan dosen pembimbing:

1. Dr. Andi Safriani., SH., M.H
2. Muhammad Anis., S.Ag.,MH.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di SD Sekelurahan Langnga Kec, Mattirosompe Kab-Pinrang. terhitung mulai tanggal 17 Juli 2017 s/d 18 Agustus 2017.

Demikian harapan kami dan terimakasih.
Wassalamu 'AlaikumWr.Wb.



Prof. Dr. Darussalam Svamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi saudara **Dastina**, NIM : **10500113285** mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul ; ***"Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah"*** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk diajukan

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut.

Samata, 18 Agustus 2017

Pembimbing I

Dr. Andi Safriani, S.H., M.H
NIP.19831122 200912 2 002

Pembimbing II

Muhammad Anis, S.Ag., M.H
NIP. 19660816 201411 1 001

Penguji I

Azhar Sinilele, S.H., M.H
NIP. 19690717 201411 1 001

Penguji II

Erlina, S.H., M.H
NIP. 19691219 200501 2 003



120171914210233

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 10083/S.01P/P2T/07/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Bupati Pinrang
Cq. Kepala BAPPEDA Kab. Pinrang

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : 2215/SI.1/PP.00.9/07/2017 tanggal 07 Juli 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **DASTINA**
Nomor Pokok : 10500113285
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH STUDI KASUS DI SEKOLAH DASAR SEKELURAHAN LANGNGA KEC. MATTIROSOMPE KAB. PINRANG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 Juli s/d 17 Agustus 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 11 Juli 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

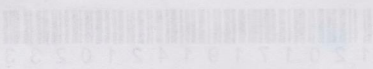


A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.



BIDANG PENYELANGKAAN PELAYANAN PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kepada Yth.
Bupati/Pintar
Cq. Kepala Bappeda Kab. Pinrang

Nomor : 10083/S.01/PST/07/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Bappeda/Balitbangda, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

A. N. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, S. H.
Pangkat : Pemula Utama Madya
Nip. 19610513 198002 1 002



PEMERINTAH KABUPATENPINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Bintang No.01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 - 923 213
PINRANG

Pinrang, 19 Juli 2017

Kepada

Nomor : 070 / 2736 / Kemas

Lamp. : -

Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth, 1. Kepala SDN 53 Langnga
2. Kepala SDN 192 Langnga
3. Kepala SDN 232 Langnga
4. Kepala SDN 52 Langnga

Di-
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala BKPMMD Prov. Sul-Sel Nomor: 10083/S.01P/P2T/07/2017 tanggal 11 Juli 2017 Perihal Izin Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : DASTINA
Nim : 10500113285
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Prog Study : Mahasiswi (S1)/ Ilmu Hukum
Alamat : Langnga, Kec. Mattiro Sompe
Telepon : 082347734514

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH" pelaksanaannya pada tanggal 17 Juli s/d Agustus 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan yang dimaksud dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra


Drs. RISMAN LAUPE
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19590305 199202 1 001

Tembusan:

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 1196 Tahun 2017

TENTANG

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca

: Surat Permohonan :
N a m a : Dastina
N I M : 10500113285
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Hari/Tanggal : Senin / 14 Agustus 2017
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Implementasi UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah"

Menimbang

- : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H
Penguji I : Azhar Sinilele, S.H., M.H
Penguji II : Erlina, S.H., M.H.
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid

Kedua Ketiga

: Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil /Skripsi
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Samata
: 11 Agustus 2017



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 143 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH /SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
Nama : Dastina
N I M : 10500113285
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Hari/Tanggal : Rabu / 30 Agustus 2017
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Implementasi UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah /Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Ta'at Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. Hamsir, M.Hum
Penguji I : Azhar Sinilele, S.H., M.H
Penguji II : Erlina, S.H., M.H
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 28 Agustus 2017

Dekan



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

Nomor :/SI.1/PP.00.9/2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 28 Agustus 2017

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (Ketua)
 2. Dr. Hamsir, M.Hum. (Sekretaris)
 3. Azhar Sinilele, S.H., M.H (Penguji I)
 4. Erlina, S.H., M.H (Penguji II)
 5. Dr. A.Safriana, M.H. (Pembimbing I)
 6. Muhammad Anis, S.Ag, M.H (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar
Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah/Skripsi Atas Nama :

Nama : Dastina
N I M : 10500113285
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah /Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Agustus 2017
Waktu : Pukul 10.00–11.00 WITA
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 1214 Tahun 2017

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum (IH) tanggal 11 Agustus 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan **Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**, maka dipandang perlu menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian**;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 dan Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**
- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta** Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kedua : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Ketiga : **Tugas Penguji** melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Keempat : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keenam : **Surat Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 11 Agustus 2017
Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

WAWANCARA

NAMA : DASTINA
NIM : 10500113285
JURUSAN : ILMU HUKUM
FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

"IMPLEMENTASI UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH"

Pasal 55 Undang-undang No.35 tahun 2014 :

- (1) Anak di dalam dan lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik tenaga kependidikan, aparatpemerintah, dan/ataumasyarakat.

Bagi mereka yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, mengakibatkan luka berat atau kematian juga tidak luput dari ancaman pidana dan/atau denda.

1. Bagaimana pencegahan yang dilakukan pendidik dan/atau tenaga kependidikan agar tidak terjadi kekerasan di lingkungan sekolah?
2. Tindakan apa yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga pendidikan apabila terjadi kekerasan di lingkungan sekolah?
3. Laporan kekerasan apa yang sering ditangani oleh pendidik dan/atau tenaga pendidik?
4. Mengapa UU sudah memberikan perlindungan kepada anak di lingkungan sekolah namun kekerasan tetap saja terjadi baik sesama siswa maupun pihak lainnya dengan siswa?
5. Fakto-faktor apa yang menghambat implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah?
6. Apakah solusi agar perlindungan anak di lingkungan sekolah dapat diterapkan?
7. Apakah kekeasan di lingkungan sekolah sewaktu-waktu dapat diterapkan oleh pendidik dan/atau tenagapendidik?

NOTE :Menjadikan kekerasan sebagai budaya agar anak tidak bermental lemah adalah *argumentum ad antiquitatem* yang tidak berdasar. KEKERASAN TIDAK AKAN MENGHASILKAN APA-APA.

“Kusiner Penelitian Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah”

Isilah setiap pertanyaan sesuai dengan yang pernah dialami dengan jujur dan tidak menyontek karena kejujuran tidak pernah salah

1. Apakah tenaga pendidik (guru, kepala sekolah dan pengurus sekolah) pernah berkata kasar (contoh : Bodoh , kurang ajar , mempermalukan di depan orang banyak dengan kata-kata kasar, mengancam, menghina dll) kepada anda?
 - a. Sering
 - b. Pernah
 - c. Tidak pernah
2. Apakah tenaga pendidik (guru, kepala sekolah dan pengurus sekolah) pernah melakukan kekerasan fisik (contoh : memukul , menjewer , menendak , melempar benda kearah mu, menampar, mencubit , dll) kepada anda ?
 - a. Sering
 - b. Pernah
 - c. Tidak pernah
3. Apakah anda pernah berkata kasar kepada teman di sekolah?
 - a. Sering
 - b. Pernah
 - c. Tidak pernah
4. Apakah anda pernah melakukan kekerasan fisik kepada teman di sekolah?
 - a. Sering
 - b. Pernah
 - c. Tidak pernah
5. Apakah teman di sekolah pernah berkata kasar kepada anda?
 - a. Sering
 - b. Pernah
 - c. Tidak pernah
6. Apakah teman di sekolah pernah melakukan kekerasan fisik kepada anda?
 - a. Sering
 - b. Pernah
 - c. Tidak pernah
7. Kekerasan apa yang sering terjadi di sekolah mu?
 - a. Fisik
 - b. Psikis(membully, berkata kasar, menghina)
 - c. Seksual
8. Kekerasan manakah yang sering ditindak lanjuti oleh pihak sekolah, masyarakat, dan pihak lainnya (keluarga, polisi, aparat pemerintah, dan masyarakat) ?
 - a. Fisik
 - b. Psikis (membully, berkata kasar, menghina)
 - c. Seksual
9. Kekerasan manakah yang biasanya diabaikan oleh pihak sekolah, keluarga, aparat pemerintah/polisi, dan masyarakat) ?
 - a. Fisik

- b. Psikis (membully, berkatakasar, menghina)
c. Seksual
10. Kekerasan fisik apa yang sering terjadi di sekolahmu ?
- a. Memukul
 - b. Mencubit
 - c. Melempar benda kearahmu
 - d. Menghukum (berlari keliling di lapangan, berdiri di depankelas, dsb)
 - e. Lainnya... (jika ada jawaban lain isi pertanyaan ini)
11. Kekerasan non fisik apa yang sering terjadi di sekolahmu ?
- a. Berkata kasar
 - b. Menyebarkan cerita bohong
 - c. Mengucilkan
 - d. Menjadikan anda sebagai bahan ejekan
 - e. Lainnya... (jika ada jawaban lain isi pertanyaan ini)
12. Apabila terjadi kekerasan di sekolah kepada siapa anda melapor?
- a. Teman
 - b. Orang tua
 - c. Guru
 - d. Kepala sekolah
 - e. Aparat Negara/kepolisian
 - f. Tidakmelapor
13. Manakah tindakan guru yang anda pilih apabila anda melakukan kekerasan fisik ?
- a. Dinasehati
 - b. Dihukum
 - c. Dibiarkan
14. Manakahtindakan guru yang anda pilih apabila anda melakukan kekerasan non fisik ?
- a. Dinasehati
 - b. Dihukum
 - c. Dibiarkan

Berani jujur itu baik

RIWAYAT HIDUP



Dastina dilahirkan di Pare-pare, pada tanggal 24 Juli 1995. Anak dari pasangan suami istri Bachtiar dan Zaenab, memulai pendidikannya dengan memasuki jenjang pendidikan formal di SDN 192 Langnga Kec. Mattisompe Kab. Pinrang pada tahun 2001 selama 6 tahun dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Mattirosompe pada tahun yang sama dan selesai pada tahun 2010.

Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di SMAN 1 Mattirosompe, selama tiga tahun dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis mendaftar di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mengambil jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun, lalu menyelesaikan studi pada tahun 2017.

ALAUDDIN
M A K A S S A R